

BAB II

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN JEPANG DAN PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Hubungan Indonesia dan Jepang telah berlangsung semenjak masa jajahan Belanda di Indonesia. Hubungan antara kedua negara sempat mengalami kesenjangan di beberapa masa, seperti ketika penjajahan Jepang di Indonesia atau pada saat terjadinya demonstrasi anti modal asing tahun 1974. Namun lepas dari beberapa kejadian tersebut, kedua negara ini akhirnya tetap melanjutkan hubungan baiknya. Bab ini berupaya untuk menjelaskan tentang dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang, serta menjelaskan beberapa faktor yang terjadi hingga mempengaruhi hubungan mereka yang berubah-ubah.

Pasca kemenangan Jepang atas beberapa negara yang berseteru dengannya dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Meiji, Jepang akhirnya memulai kehidupannya yang modern dan maju. Karena beberapa hal tersebut, hubungan perdagangan Jepang dengan negara yang lebih luas pun terjalin dan tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 1910 misalnya, perusahaan pelayaran Jepang, *Nanyo Yusen*, mulai membuka jalur pelayaran ke Pulau Jawa (“Dinamika Hubungan Indonesia-Jepang (Akhir Abad ke-19 Sampai Tahun 1970),” 2012).

A. Sejarah Hubungan Indonesia Jepang

1. Hubungan Indonesia-Jepang Sebelum Kemerdekaan

Hubungan Indonesia dan Jepang sudah terjalin sejak VOC (*Verenigde Indische Company*) yang didirikan Belanda berada di kepulauan Nusantara (“Dinamika Hubungan Indonesia-Jepang (Akhir Abad ke-19 Sampai Tahun 1970),” 2012). VOC sebagai kongsi dagang bergengsi pada waktu itu berdagang dengan kekaisaran Jepang. Jepang yang pada saat itu

menerapkan politik negara tertutup pun hanya melakukan kerjasama dengan VOC. Hal tersebut membedakan Jepang dengan bangsa Eropa lain yang pada waktu itu tidak dapat membuka perdagangan, bahkan VOC memiliki tempat dagang di Jepang. Tempat bagi pedagang VOC ini terletak di pulau bernama Deshima (Ricklefs, 2007).

Dinamika politik Jepang pun terus berkembang seiring berjalannya waktu. Politik tertutup yang telah lama mereka terapkan, akhirnya berganti menjadi politik terbuka pada tahun 1853. Akibat dari berubahnya sistem politik ini, bangsa Barat pun dapat dengan leluasa melakukan ekspansi ekonomi dan teknologinya ke Jepang. Selain itu, Jepang segera menyadari akan kemajuan teknologi yang dimiliki bangsa Barat. Karena kemajuan teknologi itulah, Jepang sadar akan kebutuhan pendidikan serta kebutuhan teknologi yang modern. Maka pada tahun 1868 ketika pemerintahan Jepang mulai dipimpin oleh Restorasi Meiji, perubahan-perubahan fundamental dilakukan. Semenjak saat itulah, Jepang memulai kehidupan yang modern dan maju (Ricklefs, 2007).

Hubungan Jepang-Indonesia (pada saat itu bernama Hindia Belanda) pada saat itu diawali dengan kedatangan imigran ilegal yang tidak terorganisir yang disebut *kimin* (Siraishi, 1998). Mayoritas *kimin* yang datang adalah perempuan. Pada tahun 1897, di Indonesia tercatat ada 125 orang imigran ilegal yang datang, yang mana 25 orang adalah laki-laki sedangkan 100 orang lainnya perempuan. Selain itu, menurut survei yang dilakukan Konsulat Jepang pada tahun 1909 di Indonesia, terdapat 782 orang imigran yang 56%-nya adalah perempuan.

Kemenangan Jepang dalam beberapa perang, menjadikan kekuatan perang Jepang sejajar dengan bangsa Barat yang merupakan suatu pencapaian tersendiri untuk negara tersebut. Dengan tujuan mencari sumber bahan bakar perang, Jepang mulai menggalakan "ekspansi ke selatan". Hingga pada paruh kedua tahun 1910-an, armada laut Jepang mulai mengimpor minyak dari Tarakan, Borneo (Muhammad, 2018).

Hubungan Indonesia-Jepang pun makin terlihat intensif pada tahun 1930-an, terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan pengusaha besar Jepang yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Beberapa pengusaha tersebut seperti Mitsubishi, Mitsui dan Sumitomo. Para pengusaha itu mendirikan cabang-cabang perusahaannya di Indonesia dengan dukungan dari Pemerintahan Jepang. Buktinya terdapat bantuan keuangan besar yang tercatat di *Bank of Taiwan* dan *Yokohama Specie Bank* untuk pengusaha dari Jepang tersebut untuk keperluan perdagangan gula (Siraishi, 1998).

Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour yang dipimpin oleh Laksamana Nagano yang mampu melumpuhkan Amerika Serikat. Hingga pada 18 Desember 1941, Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Sedangkan Jepang pada 1 Januari 1942 pun merespon dengan menyatakan perang dengan Hindia Belanda, yang diikuti oleh kedatangan militer Jepang ke Hindia Belanda (Kurniawan, n.d.).

Pada awal kedatangannya ke Indonesia, Jepang menyebarkan propaganda bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia. Propaganda tersebut bertujuan untuk mengambil hati rakyat Indonesia agar mendukung Jepang di Perang Pasifik. Selain itu, masih banyak propaganda-propaganda lain yang disebar agar Jepang mendapatkan kepercayaan bangsa Indonesia secara penuh untuk memudahkan Jepang mengambil sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang ingin memberikan kemerdekaan tersebut apabila Jepang merasa bahwa pemimpin Indonesia bersedia menjadi negara sekutu dengan Jepang. Namun, janji tersebut adalah janji yang sangat tidak pasti. Hingga pada 6 dan 7 Agustus 1945 para pejuang Indonesia mengetahui bahwa Nagasaki dan Hiroshima terkena bom atom dan menganggap hal tersebut adalah peluang untuk bebas dari masa jajahan Jepang. Selain itu, pada saat tersebut

pun Uni Soviet sudah menguasai beberapa wilayah Jepang. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia membacakan proklamasi yang menandakan kemerdekaan Indonesia dari segala penjajahan.

Jadi hubungan yang terjalin sebelum kemerdekaan Indonesia berawal dari hubungan perdagangan yang kemudian Jepang menyadari bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Sehingga hal tersebut membuat Jepang menginginkan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang ada untuk mendukung kebutuhan perang-perang yang dilakukan Jepang.

2. Hubungan Indonesia-Jepang Pasca Kemerdekaan

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan titik kerengangan antara Indonesia dan Jepang. Seluruh keinginan Jepang untuk menguasai negara-negara lain terhenti untuk fokus pada pembangunan kembali pasca perang. Hubungan Indonesia dan Jepang sendiri mulai membaik setelah Amerika Serikat mengundang Jepang dalam Konferensi San Fransisco tahun 1951. Pada konferensi tersebut membahas tentang pampasan perang Jepang kepada negara-negara di masa Perang Pasifik, yang tidak terkecuali Indonesia.

Dalam perundingan tentang pampasan perang yang harus Jepang berikan kepada Indonesia akhirnya selesai pada 20 Januari 1958 dengan ditandatanganinya perjanjian. Pada Desember 1957, disusunlah Memorandum Kobayashi-Djuanda yang menyatakan bahwa pampasan perang Jepang akan diberikan dalam kurun waktu 12 tahun sebesar US\$ 230 juta. Hingga pada tanggal 15 April 1958 memorandum tersebut disetujui dan diratifikasi di Tokyo yang dilanjutkan dengan membaiknya hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia pada tahun 1963. Hubungan antara kedua negara berlangsung dengan baik hingga pada tahun 1974 hubungan ekonomi terganggu karena adanya demonstrasi anti

modal asing. Tetapi setahun setelah tahun itu keharmonisan keduanya terus terjaga dalam segala bidang (Zanden, n.d.).

3. Hubungan Indonesia-Jepang Pada Masa Orde Lama-Orde Baru

Pasca penjajahannya di Indonesia, Jepang masih terus berhubungan dengan Indonesia. Dapat dilihat selama masa orde lama hingga orde baru bahwa Jepang dan Indonesia dalam masa penjajakan agar kerjasama dan hubungan diplomasi antara keduanya dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Di dalam pemerintahan Presiden Soekarno, politik luar negerinya berfokus untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Presiden Soekarno sangat menjunjung tinggi sikap anti imperialis dan anti kolonialis sehingga hal tersebut berakibat dengan tertutupnya politik luar negeri dengan negara-negara barat. Politik luar negeri pada masa Soekarno dikenal dengan politik luar negeri konfrontasi. Untuk pembangunan ekonomi Indonesia pada saat itu, Soekarno memiliki semboyan “berdiri di atas kaki sendiri”, yang mana hal tersebut merealisasikan bahwa Indonesia anti-Barat.

Walaupun presiden Soekarno memiliki semboyan “berdiri di atas kaki sendiri”, bantuan luar negeri yang diberikan Jepang di Indonesia pada tahun 1965 berkembang dengan signifikan. Bahkan pada saat itu, Jepang menjadi pemberi bantuan luar negeri nomor satu di Asia dan menjadi nomor dua di dunia terkait dengan bantuan luar negeri nya di Indonesia. Pada tahun tersebut, Jepang memberikan bantuan hingga US\$ 231 juta dengan US\$ 63 juta sebagai bantuan jangka pendek dan US\$ 168 juta sebagai bantuan jangka panjang serta menengah (“Sejarah Bantuan ODA Jepang di Indonesia,” n.d.).

Berbeda dengan masa kepemimpinan presiden Soekarno, presiden Soeharto lebih fokus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang sedang mengalami keterpurukan pada saat itu. Salah satu cara yang digunakan oleh presiden

Soeharto adalah dengan membuka peluang yang besar bagi investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia dengan tujuan agar kondisi ekonomi Indonesia dapat kembali stabil dan hal tersebut dapat menyokong perdagangan bebas yang tertunda di Indonesia. Keterbukaan pemerintah orde baru pada modal atau pun investasi asing dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tanggal 1 Januari 1967. Tentunya kesempatan ini tidak disia-siakan oleh negara-negara yang mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia, seperti Jepang.

Pada era Soeharto, pemerintahannya memiliki konsep pembangunan. Langkah awal pemerintahan tersebut untuk mendapatkan dukungan modal adalah kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mana pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia keluar dari organisasi tersebut. Setelah menjadi anggota PBB, Indonesia diberikan bantuan dengan pembentukan *Inter-Governmental Group on Indonesia* atau IGGI pada tanggal 20 Februari 1967 yang dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi negara-negara pemberi modal bagi Indonesia. Maksud lain dari pembentukan IGGI ini adalah sebuah forum internasional yang memiliki tujuan sebagai perantara koordinasi antara Indonesia dan bank-bank internasional dalam hal ide-ide untuk pembangunan dan bantuan keuangan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden Soeharto untuk menarik kembali modal asing sangatlah memiliki alasan yang kuat. Soeharto sangat menyadari bahwa pada awal kepemimpinannya Indonesia sedang mengalami inflasi yang tinggi, para pengangguran yang meningkat, hutang yang membengkak serta ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk membangun industri. Kebijakan yang dilakukan Soeharto didasarkan atas keinginan untuk membangun kembali perekonomian dan meningkatkan teknologi yang lebih maju.

Pada bulan Mei 1973, Jepang melalui *Inter-Governmental Group on Indonesia* atau IGGI berkomitmen untuk memberikan pinjaman modalnya sebesar US\$ 180 juta ke

Indonesia, yang mana pinjaman ini lebih besar daripada modal yang akan diberikan Amerika sebesar US\$ 150 juta. Jepang tidak ragu memberikan modal yang sangat besar bagi Indonesia karena Jepang tahu bahwa sumber daya yang dimiliki Indonesia melimpah serta tenaga kerja buruh di Indonesia terbilang murah (“Kompak Menampik Saudara Tua (Jepang),” 2014). Pada semester kedua tahun 1973, Jepang memiliki 119 proyek di Indonesia yang modalnya mencapai US\$ 467,7 juta, sedangkan total modal yang diberikan Jepang pada tahun 1973 mencapai US\$ 611,5 juta dengan 147 proyek (Tahiro, 2003). Peningkatan yang besar dalam tahun tersebut membuktikan bahwa Jepang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap Indonesia.

Namun, masuknya modal asing dari Jepang bukan hanya membantu Indonesia secara finansial untuk pembangunan ekonomi, hal tersebut juga membuat masalah sendiri di dalam negeri. Puncak masalah tersebut terjadi pada 15 Januari 1974 ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka akan berkunjung ke Indonesia. Peristiwa itu disebut *Malari*, dimana mahasiswa sengaja menyambut kedatangan PM Jepang dengan demonstrasi besar-besaran (Yasunari & Mamoru, 2011). Demonstrasi ini atas dasar rasa protes akibat aliran modal asing yang semakin besar masuk ke Indonesia, yang dianggap dapat mematikan ekonomi dan industri dalam negeri.

Pada dasarnya terdapat beberapa pendapat yang dapat menjelaskan mengapa Jepang sangat tertarik memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia, yaitu (Sudo, 2002):

- a. Indonesia merupakan negara penerima investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*, FDI) terbesar Jepang, dimana jika dikaitkan dengan faktor sejarah sejak 1967 hingga 1990 dalam sektor non-migas total FDI Jepang di Indonesia mencapai US\$ 7,9 miliar.
- b. Jepang merupakan partner dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor atau impor. Kedua negara juga mengalami bentuk-bentuk ketergantungan yang besar.

- c. Indonesia merupakan negara pengekspor energi dalam jumlah besar ke Jepang. Bahkan ekspor gas alam (LNG) sejak dekade 1980-an merupakan yang terbesar di dunia.
- d. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta upah tenaga kerja yang murah yang didukung oleh jumlah penduduk yang banyak menjadikan daya tarik yang besar, bukan hanya sebagai partner penyedia bahan baku, tetapi juga pangsa pasar yang strategis.

4. Hubungan Indonesia-Jepang Pada Masa Reformasi Hingga Saat Ini

Hubungan Indonesia semakin membaik setelah memasuki abad 1980-an. Isu-isu populer pada masa itu masih seputar investasi, perdagangan, alih teknologi, dan bantuan keuangan yang diberikan Jepang ke Indonesia (Bandoro, 1994). Walaupun ada beberapa isu yang mulai bermunculan, namun isu ekonomi dan keamanan masih menjadi topik utama. Dapat dilihat bahwa investasi asing terbesar pada tahun-tahun tersebut berasal dari Jepang yang mencapai 24,8% (Bahri, 2004). Namun, hubungan ekonomi ini tidak selalu berjalan dengan baik. Pada tahun 1989, nilai ekspor Jepang ke Indonesia hanya mencapai US\$ 3,3 miliar. Yang mana hal tersebut jauh berbeda dengan nilai impor Jepang dari Indonesia yang pada saat itu mencapai US\$ 11 miliar (Bahri, 2004). Meski pada saat itu Jepang mengalami defisit yang cukup besar, tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang sangat membutuhkan bahan mentah yang berasal dari Indonesia, oleh karena itu Jepang tetap melakukan impor dari Indonesia.

Banyak faktor yang mempengaruhi hubungan Indonesia dan Jepang seperti banyaknya masyarakat yang tinggal di kedua negara sebagai komunitas transnasional. Keberadaan masyarakat Jepang di Indonesia ataupun sebaliknya sangat berperan untuk '*agent of change*' yang bisa mendekatkan kedua masyarakat pada bidang ekonomi, sosial ataupun lainnya. Tanpa disadari, keberadaan masyarakat transnasional memiliki

peranan penting bagi dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Jepang (“Japan-Indonesia Relations,” n.d.).

Hal lain yang berpengaruh adalah eksistensi hubungan para pemimpin kedua negara (*political will factors*). Faktor ini dapat dilihat dari kunjungan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah kedua negara, dari tingkat menteri sampai kepala negara (Muhammad, 2018). Tabel dibawah ini akan menunjukkan eksistensi kunjungan pejabat kedua negara:

Tabel 1.1 Daftar Kunjungan Pejabat Jepang ke Indonesia

NO	Tanggal Kunjungan	Nama Pejabat
1	Maret 1998	Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto
2	November 1998	Menteri Luar Negeri Masahiko Koumura
3	Juli 1999	Menteri Luar Negeri Masahiko Koumura
4	April 2000	Menteri Luar Negeri Yohei Kono
5	Januari 2002	Perdana Menteri Junichiro Kaizumi
6	Oktober 2003	Perdana Menteri Junichiro Kaizumi
7	Juli 2004	Menteri Luar Negeri Yoriko Kawaguchi
8	Januari 2005	Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan Menteri Luar Negeri Nobutaka Machimura
9	April 2005	Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan Menteri Luar Negeri Nobutaka Machimura
10	Agustus 2007	Perdana Menteri Abe

Sumber: (“Hubungan Biaterral Indonesia-Jepang: Dasar Data,” n.d.)

Tabel 2.2 Daftar Kunjungan Pejabat Indonesia ke Jepang

NO	Tanggal Kunjungan	Nama Pejabat
1	Maret 1998	Wakil Presiden B.J. Habibie
2	November 1999	Presiden Abdurrahman Wahid
3	April 2000	Presiden Abdurrahman Wahid
4	September 2001	Presiden Megawati Soekarno Putri
5	Juni 2003	Presiden Megawati Soekarno Putri
6	Desember 2003	Presiden Megawati Soekarno Putri
7	Juni 2005	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
8	November 2006	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
9	Mei 2007	Wakil Presiden Jusuf Kalla

Sumber: ("Hubungan Biaterral Indonesia-Jepang: Dasar Data," n.d.)

Kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh pejabat kedua negara seperti yang tertera pada dua tabel di atas sangat memberikan dampak kemajuan hubungan yang lebih baik. Bidang-bidang yang dapat tercapai dari beberapa kunjungan tersebut seperti perdagangan dan investasi. Indonesia menganggap Jepang adalah salah satu mitra ekspor-impor yang menguntungkan, begitu pula sebaliknya. Dilihat dari ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2007 mencapai US\$ 23,6 miliar dan impor dari Jepang ke Indonesia mencapai US\$ 6,5 miliar sehingga Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia pada tahun tersebut ("Perdagangan Jepang di Indonesia, Kembali Surplus," 2007).

Selain itu, Pada tahun 2017, Jepang tercatat sebagai negara dengan ekonomi yang maju ke-3 dengan nilai GDP sebesar US\$ 4,8 triliun setelah Amerika Serikat dan China. Hal lain yang sudah terlihat bahwa Jepang adalah negara dengan

perkembangan teknologi yang pesat. Di Jepang sudah banyak industri-industri yang memiliki teknologi tinggi yang menghasilkan kendaraan, barang elektronika, peralatan mesin, kapal, dan lain-lain. Melihat reputasi Jepang tentunya Indonesia memiliki harapan yang tinggi untuk bisa mendapatkan dampak yang positif dari kemajuan ekonomi yang telah dimiliki negara tersebut dengan kerjasama yang selama ini telah terjalin.

B. Perkembangan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengelola, menjalankan dan membangun negara tersebut. Walaupun tidak dapat dipungkiri, terdapat hal-hal selain ekonomi yang dapat menjadi indikator lainnya. Beberapa tahun terakhir ini ekonomi Indonesia bisa dikatakan lebih stabil setelah mengalami kemunduran pada krisis tahun 1998. Penjabaran sub bab ini akan dimulai dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Pada awal kepemimpinannya atau pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki PDB per kapita sebesar Rp 5.523.863,00. Hingga pada tahun 1961, menurut Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,74 persen hingga tahun berikutnya, 1962. Namun pada tahun 1963, pertumbuhan tersebut mengalami penurunan hingga minus 2,24 persen (“Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 2018).

Penyebab penurunan tersebut dipicu oleh biaya politik yang tinggi pada saat itu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun sempat defisit hingga minus Rp 1.565,6 miliar yang diikuti dengan inflasi yang melambung sampai 600 persen hingga tahun 1965. Meskipun seperti itu, pada tahun 1964 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali ke angka positif sebesar 3,53 persen. Yang dilanjutkan pada tahun 1965 di angka 1,08 persen walaupun turun dari tahun sebelumnya, tetapi masih mempertahankan angka positifnya. Dan pada akhir kepemimpinan Presiden Soekarno, pertumbuhan ekonomi

Indonesia mencapai 2,79 persen (“Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 2018).

Menginjak masa kekuasaan Presiden Soeharto yang memiliki kepemimpinan hingga lebih dari tiga dekade, perekonomian Indonesia mengalami masa pasang surut yang sangat dirasakan pada saat itu. Ketika awal masa jabatannya, perekonomian Indonesia sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Untuk mendorong pemasukan negara pada saat itu, Presiden Soeharto membuat Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dengan tujuan agar para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Di tahun 1969, Soeharto membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai upaya mendorong swasembada. Repelita ini dimulai dari tanggal 1 April 1969. Fokus pada repelita ini adalah sektor pertanian Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kurang lebih 55% produk nasional berasal dari sektor pertanian dan 75% penduduk Indonesia merupakan petani (Keastawan, 2018). Rencana pembangunan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lumayan, yang dapat dilihat di tahun 1970 bahwa ekonomi Indonesia tumbuh hingga 10,92 persen (“Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 2018).

Sayangnya ada kekurangan yang fatal pada saat pemerintahan Soeharto dimana kegiatan ekonomi pada saat itu berada di pemerintahan hingga hampir 70 persen, sehingga hal ini berdampak pada masa krisis pada tahun 1998, ketika pemerintah yang harusnya menjadi penopang ekonomi pada saat itu kehilangan pijakan dan mengakibatkan jatuhnya ekonomi Indonesia. Di tahun yang sama pun, beberapa negara yang telah berkerja sama dengan Indonesia memutuskan untuk tidak membantu. Akibat dari krisis dan tidak adanya bantuan pada saat itu adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi sampai minus 13,13 persen. Hingga satu-satunya jalan keluar pada saat itu adalah menandatangani kesepakatan dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan menjadikan Indonesia memiliki

banyak hutang negara (“Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 2018).

Setelah diberi warisan berupa kemerosotan ekonomi, Presiden B.J Habibie berjuang untuk mengembalikan keadaan agar lebih baik. Pemerintahan ini dikenal sebagai rezim transisi. Pencapaian yang langsung terlihat adalah di tahun berikutnya, yang mana ekonomi Indonesia tidak lagi di bawah garis minus yaitu 0,79 persen. Presiden Habibie menerapkan kebijakan keuangan dan moneter pada saat itu, yang dapat menguatkan kembali kurs rupiah pada November 1998 yang sebelumnya Rp 16.650,00 per dollar AS menjadi Rp 7.000,00 per dollar AS (“Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 2018).

Memasuki masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang juga berjuang mendongkrak ekonomi Indonesia setelah turunnya Presiden Habibie, secara perlahan pertumbuhan tersebut terlihat pada tahun 2000 yang mencapai 4,92 persen. Masa ini menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, dimana pemerintah membagi dana merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah pun menerapkan pajak dan retribusi daerah. Namun walaupun dengan beberapa perbaikan kebijakan yang telah dilakukan, dampak yang diberikan belum terlalu signifikan. Ekonomi Indonesia pun tumbuh melambat pada tahun 2001 senilai 3,64 persen (“Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 2018).

Setelah Presiden Megawati menjabat, pertumbuhan ekonomi yang signifikan mulai terlihat. Dalam setiap tahun pemerintahannya ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pada 2002, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,5 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 3,64 persen. Di tahun 2003 pun juga mengalami kenaikan menjadi 4,78 persen. Hingga di akhir masa jabatannya di tahun 2004, perekonomian Indonesia tumbuh sampai 5,003 persen. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada masa itu sangat konsisten dan sangat menjaga sektor perbankan yang

menerbitkan surat utang dan obligasi secara langsung. Perekonomian Indonesia pada saat itu terarah kembali dan mandiri dengan munculnya pelaku-pelaku ekonomi baru. Tingkat kemiskinan pun menurun hingga 16,7 persen di tahun 2004 dari 18,4 persen di tahun 2001 (“Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Masa Ke Masa,” 2018).

C. Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1967 adalah awal mula adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang terbuka pada berbagai sektor. Pembuatan Undang-Undang ini menggunakan kebijakan konsep pintu terbuka, sehingga investasi asing yang menjadi prioritas utama Indonesia dapat menghasilkan dana selain utang luar negeri.

UU No. 1 Tahun 1967 ini pun berisi berbagai insentif dan jaminan kepada calon investor asing. Di dalam UU ini terdapat masa bebas pajak dan jaminan nasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional dan dengan kompensasi penuh sesuai hukum internasional. Seperti yang disebut di atas, dengan kebijakan pintu terbuka ini akhirnya menarik investor asing terutama di bidang pertambangan dan manufaktur (Mukhti, n.d.).

Walaupun setelah penerapan Undang-Undang ini mulai muncul beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, tidak sedikit pula yang memberikan kritik terhadap UU ini dari pihak dalam negeri. Hal ini dikarenakan menyebabkan beberapa ketidakadilan bagi pihak Indonesia seperti bagi hasil yang tidakimbang atau pajak yang terlalu ringan bagi investor. Sehingga setelah bergantinya kepemimpinan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal pun terus diperbaiki dan diperbarui agar tetap memberikan keuntungan yang lebih banyak di pihak Indonesia.

Selain itu tidak dapat kita pungkiri bahwa penanaman modal adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan

perekonomian nasional. Dan tujuan dari pelaksanaan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor yang akan menghambat hal tersebut diatasi, antara lain melalui: penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum bidang penanaman modal, iklim usaha yang kondusif, perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa hal diatas yang mendukung untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 serta perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 yang mana selama ini menjadi dasar hukum bagi penanaman modal di Indonesia. Meskipun setelah pergantian kedua undang-undang tersebut penanaman modal asing atau dalam negeri di Indonesia terus berkembang, namun untuk pengoptimalan kedua hal tersebut diperlukan perubahan UU lagi (Hartini, 2009).

Pada dasarnya Undang-Undang ini telah mengatur mengenai kegiatan penanaman modal langsung di Indonesia secara komprehensif agar tercipta iklim investasi yang kondusif tetapi tetap mengedepankan kepentingan nasional. Namun yang perlu dicermati adalah beberapa pasal yang ada di dalam UU Penanaman Modal yang tidak konsisten, dimana terdapat pertentangan substansi dan tujuan dari nilai filosofis undang-undang tersebut. Di dalam UU Penanaman Modal yang sudah ada pun banyak yang sebenarnya telah ada perundangan sendiri, seperti UUPA, UU Pasar Modal, dan UU PT (Hartini, 2009).

Selain itu menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM)), ada hambatan-hambatan yang mengganggu pergerakan investasi di Indonesia. Kendala tersebut seperti kesulitan dalam memperoleh bahan baku, adanya sengketa antara pemegang saham dalam perusahaan, perusahaan kesulitan mendapatkan area lahan yang sesuai, kesulitan pemasaran produk dan kesulitan mendapatkan dana atau pembiayaan proyek. Selain hambatan diatas terdapat masalah

pengaturan hukum, faktor lingkungan bisnis baik regional, nasional maupun global yang tidak mendukung serta kurangnya menarik insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah, adanya peraturan yang inkonsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, ataupun peraturan lainnya yang mengganggu peraturan mengenai penanaman modal yang tidak mendukung investasi di Indonesia (Hartini, 2009).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pada tahun 2006 pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan pada 29 Maret 2007 RUU tersebut akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perubahan peraturan yang dilakukan ini adalah untuk memberikan investor kepastian hukum, kepastian yang sama baik investor dalam dan luar negeri serta transparansi. Tentunya perubahan-perubahan yang terdapat dalam peraturan baru ini akan memudahkan para investor, terutama investor asing.

Selain hal-hal diatas, terdapat pengaturan tentang fasilitasi yang diberikan untuk para investor. Diantara peraturan tersebut seperti pembebasan bea masuk atau impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, fasilitasi Pajak Penghasilan (PPH) melalui pengurangan penghasil netto, pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas impor barang modal, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan, pembebasan bea masuk bahan baku atau menolong untuk keperluan produksi tertentu, pengurangan pajak penghasilan badan, kemudahan pelayanan keimigrasian, dan kemudahan perizinan impor (Hartini, 2009).

Adanya beberapa peraturan baru dalam UU Penanaman Modal ini diharapkan dapat mengoptimalkan datangnya investasi asing di Indonesia. Sehingga dengan datangnya investor baik dari dalam ataupun luar negeri tersebut dapat membantu Pemerintahan Indonesia mencapai kepentingan nasionalnya.